

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan dewasa ini, menuntut adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu bersaing dalam berbagai kegiatan bisnis maka untuk itu perlu membentuk satu wadah yang paling cocok untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu wadah (lembaga) yang dimaksudkan adalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang ada di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat memperluas penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan lapangan usaha, peningkatan Pendapatan masyarakat luas secara lebih merata.

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan merupakan salah satu sistem perekonomian yang dapat dijadikan wahana atau tumpuan yang paling utama bagi penciptaan wirausaha baru, karena merupakan tataran terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat kecil. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) mempunyai karakteristik keluasan daya tampung yang besar bagi perwujudan aspirasi ekonomis terutama untuk masyarakat kecil guna memperoleh penghidupan, khususnya yang tergolong pendapatan rendah.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) merupakan bentuk aktivitas masyarakat perdesaan disektor riil, bisa berupa usaha yang memproduksi suatu bahan, bidang Penjualan atau pemasaran maupun yang berbentuk jasa.

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dapat diajukan pendanaanya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berfungsi yaitu untuk meningkatkan atau pengembangan usaha yang menguntungkan dan sedang dijalankan dan membuka peluang usaha baru yang menguntungkan sesuai ketrampilan /keahlian yang dimiliki dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau membayar kembali.

Sesuai kebijakan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dana yang digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) adalah pinjaman yang harus dikembalikan dan kemudian digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya (dana pinjaman bergulir). Adanya kegiatan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) diharapkan dapat meningkatkan, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan. Agar dana pinjaman bergulir tersebut dapat di manfaatkan secara berkelanjutan dengan baik dan benar, maka perlu adanya tim atau unit pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan serta kerangka acuan dalam melakukan pengelolaan dana tersebut.

Dana pinjaman bergulir tersebut akan di salurkan kepada masyarakat melalui wadah tim pengelolaan kegiatan yang ada di desa dan di kembalikan (bersama jasa pinjamannya) kepada unit pengelola kegiatan di kecamatan. pengembalian dana pinjaman bergulir di salurkan kembali kepada kelompok masyarakat berdasarkan atas prinsip dan kebijakan dari PNPM serta ketentuan yang telah disepakati oleh musyawarah antar desa.

Untuk mengoperasikan atau mengelola kegiatan ini, selain tetap mengacu pada prinsip dan kebijakan PNPM sebagaimana dalam petunjuk Teknis Operasional ada hal-hal prinsip lainnya yang perlu diperhatikan seperti setiap pengelolaan dana pinjaman bergulir dilakukan secara sederhana dan bisa di mengerti oleh masyarakat luas. Selain itu perlu memberi kemudahan kepada masyarakat miskin yang akan mengembangkan peluang usaha untuk mengajukan dan memperoleh persetujuan pemanfaat dana pinjaman bergulir. Kemudian tatacara dan prosedur dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir diupayakan agar melembaga menjadi suatu sistem yang baku sebagai hasil kesepakatan masyarakat. Jika akan mengadakan suatu perubahan pun harus berdasarkan kembali atas kesepakatan bersama dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Proses pengelolaan dana dan pengembalian keputusan mengenai pengelolaan dilakukan secara professional dengan mempertimbangkan upaya menumbuhkan dan meningkatkan sumber daya dan kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Setiap keputusan pengelolaan dana modal usaha harus dapat mendorong tercapainya pengembangan dana modal usaha dan meningkatkan pertumbuhan aktifitas ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan dana dan kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pengelolaan dana pinjaman bergulir, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah pengajuan usulan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dilakukan oleh kelompok-kelompok yang telah ada dimasyarakat. Syarat minimal kelompok yang dapat mengajukan dana pinjaman

bergulir adalah memiliki ikatan pemersatu yang jelas, saling mengenal diantara anggota-anggotanya, mempunyai aktifitas ekonomi atau sosial kemasyarakatan, dan ada pertemuan rutin atau berkala diantara anggota-anggotanya.

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan PNPM mandiri. Yang terdiri dari PNPM mandiri perdesaan, PNPM perkotaan, serta PNPM mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Sejak itulah Desa Pancakarsa 1 Kecamatan Taluditi ikut berpartisipasi dalam proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sejak itulah Desa Pancakarsa 1 Kecamatan Taluditi membentuk kelompok SPKP dan memperoleh bantuan pemerintah tentang SPKP yang ada di PNPM. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang terdapat di Desa Pancakarsa 1 merupakan salah satu program guna menopang dan mencukupi biaya usaha. Tujuan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) adalah untuk meningkatkan usaha masyarakat sehingga mereka mampu menjalankan usaha secara optimal, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pula kesejahteraan hidup masyarakat.

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Pancakarsa 1 Kecamatan Taluditi belum berjalan sebagai mana yang diharapkan. Sesuai data yang diperoleh melalui PNPM bahwa dari 30 orang penerima bantuan SPKP hanya 4 orang atau 14% warga masyarakat yang mampu mengembalikan pinjaman tepat batas waktu yang telah ditentukan, 2 orang 9% dan warga masyarakat yang mampu mengembalikan dana tetapi melewati batas waktu yang telah ditentukan, kemudian sisanya 23 orang atau 77% warga masyarakat tidak mampu mengembalikan dana pinjaman secara tuntas. Kenyataan yang lain

menunjukkan bahwa sebagian anggota masyarakat yang menerima bantuan tidak memiliki ketrampilan atau keahlian yang sebenarnya tidak layak untuk menerima bantuan bila dikaitkan dengan persyaratan seperti yang telah diuraikan diatas. Tetapi karena pendekatan tertentu dengan para pengurus PNPM, mereka tetap memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha tersebut. Keadaan ini mengakibatkan dana yang telah dipinjamkan kepada mereka tidak secara optimal dapat dikembalikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian pada sisi lain akibatnya dana yang telah dipinjamkan tersebut tidak dapat bergulir untuk mengembangkan usaha warga masyarakat yang lain, sehingga keadaan ini menimbulkan berbagai keluhan tentang ketidakadilan dari warga masyarakat.

Permasalahan lain sesuai hasil pengamatan peneliti yakni ada sebagian kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan untuk mengembangkan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola dana yang telah diterima guna untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Kondisi ini mengakibatkan usaha mereka yang mereka geluti sebagai sasaran pengembangan tidak mengalami kemajuan, kemudian pada akhirnya dana yang telah dipinjamkan tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Keadaan ini mengakibatkan dana Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) tidak dapat bergulir untuk warga masyarakat lain yang sangat memerlukan bantuan untuk pengembangan usaha mereka

Berdasarkan hasil wawancara singkat peneliti dengan masyarakat, penerima bantuan SPKP bahwa faktor penyebab timbulnya berbagai

permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan SPKP adalah sangat bervariasi, dan terangkum dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah aspek yang berasal dari dalam diri masyarakat dan faktor eksternal adalah aspek yang berasal dari luar diri masyarakat yang meliputi faktor ekonomi dan faktor sosiologis. Penyebab faktor ekonomis adalah sistem pengelolaan usaha yang tidak memberikan keuntungan, sehingga ketika dana SPKP tersebut dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati kondisi usaha tidak mengalami perkembangan. Penyebab faktor sosiologis yaitu sikap masyarakat terhadap program tersebut yang belum memberikan respon yang positif. Sikap masyarakat yang dimaksud adalah berkaitan dengan aspek pengetahuan, penerimaan dan kecenderungan bertindak terhadap pengelolaan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

Berbagai permasalahan yang telah diungkapkan diatas, bila tidak dicari solusinya, maka Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang dilaksanakan di Desa Pancakarsa 1 Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato tidak memberikan makna yang sangat berarti bagi Pengembangan usaha warga masyarakat. Selain itu kondisi juga dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap warga masyarakat karena diakibatkan ketidakmampuan mengelola dana yang telah di pinjamkan kepada mereka. Konsekuensinya lain yang muncul adalah taraf kesejahteraan hidup masyarakat tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, mendorong peneliti untuk mengadakan suatu penelitian terutama difokuskan pada masalah sikap

warga masyarakat terhadap Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dengan formulasi judul: **Sikap Masyarakat Terhadap Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Pancakarsa 1 Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.**

2.2 Identifikasi Masalah

Berasumsi dari berbagai kondisi riil yang telah diungkapkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sebagian anggota masyarakat yang menerima bantuan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) telah memiliki usaha yang jelas?
2. Apakah semua warga masyarakat yang dipersyaratkan tetap menerima bantuan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)?
3. Faktor apakah yang menyebabkan warga masyarakat belum dapat mengembalikan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dana yang telah dipinjamkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan?
4. Apakah warga masyarakat penerima dana bantuan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) telah memiliki sikap yang positif terhadap usahanya?
5. Apakah anggota kelompok masyarakat yang telah meminjam dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) ini dapat mengelola usaha mereka dengan baik?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi permasalahan maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap Program Simpan Pinjam Kelompok (SPKP) di Desa Pancakarsa 1 Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato?
2. Faktor –Faktor apakah yang menghambat sikap masyarakat dalam mengembangkan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Pancakarsa 1 Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sikap masyarakat terhadap Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Pancakarsa 1 Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat sikap masyarakat dalam mengembangkan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Pancakarsa 1 Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang bersifat ilmiah kepada instansi terkait dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)
3. Bagi peneliti kajian ini merupakan latihan dalam menelaah beberapa masalah sosial khususnya Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

1.5.2 **Manfaat Praktis**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi pada pelaku program yang ada di desa dalam upaya menyukseskan PNPM tentang pelaksanaan SPKP
2. Menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
3. Bagi peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini pada populasi yang lebih besar sehingga diperoleh hasil kajian pengembangan dalam upaya untuk mengembangkan PNPM tentang SPKP.